

Problema Pendidikan Agama di Madrasah

Hasib Rosyadi¹

¹ Madrasah Diniyah Ar-Rosyad, Gg. Masjid Ar-Rosyad, No.51, Ds. Pehkulon, Kec. Papar, Kab Kediri, Jawa Timur, 64153, Indonesia.

Email: sheebonds@gmail.com

Abstrak: Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang meliputi seluruh potensi manusia yang berdasar fitrahnya untuk mencapai keselarasan dan harmonisasi kehidupan secara sosial, individual, dan spiritual. Metode dalam penulisan makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif berbentuk kajian pustaka. Metode analisisnya memakai metode analisis isi. Sumber utamanya adalah berbagai jurnal yang memuat tentang penelitian problematika pendidikan agama Islam di berbagai madrasah di Indonesia. Dalam identifikasi problematika pendidikan agama yang ada di madrasah ada dua faktor; Internal; Manajemen pendidikan Islam yang terletak pada ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai, ketidakserasian kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional, terjadinya salah pengukuran terhadap hasil pendidikan serta masih belum jelasnya landasan yang di pergunakan untuk menetapkan jenjang-jenjang tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga keperguruan tinggi. Eksternal ; (1) Secara politis, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur melalui UU sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003 diakui memang memuat keberadaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. (2) Dikotomi, dalam beberapa aspek yaitu antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, antara Wahyu dengan Akal setara antara Wahyu dengan Alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama, (3) Keterbatasan Anggaran. Kiprah pendidikan Islam di kalangan umat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia untuk mencetak generasi penerus bangsa tidak bisa diabaikan lagi. Perkembangannya begitu pesat mulai dari pendidikan informal hingga menjadi pendidikan formal yang sejajar dengan pendidikan umum. Kedudukannya kuat sebagai bagian dari Sisdiknas, dengan payung hukum UU Sisdiknas yang secara tegas menyiratkan kedudukan madrasah yang sama dengan sekolah umum. Kurikulum yang termuat dalam pendidikan di madrasah adalah 100% umum ditambah ilmu agama. Berbagai persoalan tersebut masih belum mendapat titik temu yang dapat menjadikan penyelenggaraan pendidikan madrasah lebih baik. Meski begitu, madrasah terus berjalan dan memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Peluangnya antara lain: semakin maraknya kehidupan umat beragama, semakin kuatnya Kemenag dalam mengelola pendidikan madrasah, animo masyarakat yang semakin baik terhadap penyelenggaraan pendidikan madrasah, serta dukungan masyarakat yang semakin luas.

Kata Kunci: Problematika Pendidikan Agama Islam, Madrasah, PAI.

1. Pendahuluan

Menurut Azra dalam Fitriani, pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami masa-masa bertahan terhadap ancaman arus modernitas tanpa harus kehilangan identitas. Salah satu dari pengalaman ini adalah upaya pembaharuan sistem Pendidikan Islam yang semula berbentuk surau dan pesantren, berubah menjadi dua bentuk lembaga pendidikan Islam modern; yang pertama sekolah-sekolah belanda yang diberi muatan pendidikan agama Islam, dan madrasah-madrasah modern yang mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda [1, p. 304].

Dari berbagai literatur tentang munculnya madrasah di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada dua faktor yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia. Dua faktor tersebut yaitu yang pertama adalah adanya gerakan pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah dan Mesir di mana banyak pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah setelah kembalinya dari wilayah tersebut membawa semangat pembaharuan ke tanah air. Kedua, adalah respon terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sedang menjajah Indonesia saat itu. Pemerintah melakukan standar ganda dalam politik etiknya. Pemerintah penjajah hanya mengembangkan pendidikan yang memiliki manfaat bagi pemerintah penjajah saja. Perbaikan pendidikan berbasis Islam justru mereka khawatirkan berdampak buruk bagi kepentingan penjajah [2, p. 200].

Menurut Yunus dalam Kosim, tahun 1900 M sebagai era pembatas antara masa sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya, pendidikan Islam berlangsung secara tradisional dalam bentuk pendidikan surau/langgar dan pesantren. Materi pelajaran murni diniyah; metode mengajar bersifat individual, ceramah, dan hafalan; belum menggunakan meja-kursi, papan tulis, dan ruang kelas. Perubahan mulai terjadi di awal abad 20 yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern berupa madrasah dan sekolah umum berciri khas Islam. Secara umum, kemunculan lembaga-lembaga modern ini ditandai dengan perubahan pada aspek-aspek; kurikulum (memperkenalkan mata pelajaran umum), metode (memperkenalkan metode-metode mengajar modern), dan sarana (mulai menggunakan meja, kursi, papan tulis, dan sistem kelas) [3, pp. 1–2].

2. Metode

Metode dalam penulisan makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif berbentuk kajian pustaka. Metode analisisnya memakai metode analisis isi. Sumber utamanya adalah berbagai jurnal yang memuat tentang penelitian problematika pendidikan agama Islam di berbagai madrasah di Indonesia.

3. Hasil

Daulay dalam Rahman menyatakan Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dan alam semesta [4, p. 1]. Umar dalam Awwaliyah berpendapat Pendidikan Islam sebagai proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya [5, p. 35]. Dari definisi di atas disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang meliputi seluruh potensi manusia yang berdasar fitrahnya untuk mencapai keselarasan dan harmonisasi kehidupan secara sosial, individual, dan spiritual.

Al-Jamaly dalam Damopolii menjelaskan tujuan pendidikan islam menurut Al Qur'an meliputi (1) menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia diantara makhluk Allah lainnya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini, (2) menjelaskan hubungan-nya sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. (3) menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta, (4) menjelaskan hubungannya dengan Kholik sebagai pencipta alam semesta [6, p. 76].

Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Agama Islam di sekolah mempunyai posisi yang cukup kuat, karena mempunyai landasan secara yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Dari tujuan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara yuridis merupakan dasar dari nilai Ketuhanan merupakan nilai yang paling mendasar dan pertama dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Ini berarti bahwa pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia. Di sinilah, pendidikan agama Islam mempunyai peranan untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik di sekolah [5, p. 42].

Peran pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional menjadi penting untuk mendorong terwujudnya manusia Indonesia mempunyai spiritual yang kuat, kepribadian dan memiliki ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan agama yang efektif bagi peserta didik menurut Lickona diperlukan sebagaimana dikutip dalam Fitriani, tiga hal: pertama, moral knowing, meliputi: moral awareness, knowing moral values, perspective-taking, moral reasoning, decision making dan self-knowledge; kedua, meliputi: conscience, self-esteem, empathy, loving the good, self control, dan humanity; dan ketiga, Moral action, meliputi: competence, will dan habit. Disamping tiga hal tersebut, juga pentingnya suasana religius dan kontrol sosial yang kuat di madrasah untuk mewujudkan pembelajaran agama yang efektif [1, pp. 308–309].

Dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan Islam diperlukan perencanaan pendidikan yang meliputi; (1) kelembagaan, (2) Kurikulum, (3) Manajemen, (4) Pendidik, (5) Peserta didik, (6) alat, sarana, dan fasilitas, (7) kebijakan pemerintah [4, p. 1].

Nizar dalam Damopolii mendasarkan bahwa sumber dari pendidikan Agama Islam dari tiga unsur; (1) al-Qur'an, (2) Sunnah, dan (3) Ijtihad [6, p. 76].

Kata “madrasah” terambil dari akar kata “darasa-yadrusu-darsan = belajar”. Kata madrasah sebagai isim makan, menunjuk arti “tempat belajar”. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Ditilik dari makna Arab di atas, madrasah menunjuk pengertian “tempat belajar” secara umum, tidak menunjuk suatu tempat tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di surau/langgar, di masjid atau di tempat lain sesuai situasi dan kondisi. [7, p. 2] Zuhairi dalam Alawiyah menyebutkan madrasah dalam arti tempat belajar adalah untuk mengajarkan dan mempelajari ajaran-ajaran agama Islam, ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Pendapat lain menyebutkan madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses belajar secara terarah, terpimpin dan terkendali. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian madrasah adalah suatu tempat belajar untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya secara terarah, terpimpin dan terkendali [8, p. 53].

Beberapa komponen yang diutamakan dalam madrasah adalah adanya lokal tempat belajar, guru, siswa dan rencana pelajaran serta pimpinan. Secara prinsip madrasah dan pesantren memiliki kesamaan yang mendasar yaitu sama-sama mengajarkan ilmu Islam dan kehadiran madrasah merupakan akibat penyesuaian

dengan pesantren.[9, p. 33] Pelajaran-pelajaran yang diajarkan di madrasah sudah tercantum dalam kurikulum yang telah ditetapkan. Adapun ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu Tingkat Ibtidaiyah (Tingkat Dasar), Tingkat Tsanawiyah (Tingkat Menengah) dan Tingkat Aliyah (Tingkat Menengah Atas) [9, p. 34].

Berdasarkan komposisi mata pelajaran, madrasah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagai mata pelajaran dasar dan pelajaran umum 70%. Statusnya ada yang negeri dan dikelola oleh Depag, dan ada yang swasta dan dikelola oleh masyarakat. Jenjang pendidikannya adalah: 1) raudlatul athfal atau bustanul athfal (tingkat taman kanak-kanak); 2) madrasah ibtidaiyah (tingkat dasar); 3) madrasah tsanawiyah (tingkat menengah pertama), dan 4) madrasah aliyah (tingkat menengah atas). Kedua, madrasah yang menyelenggarakan pendidikan agama dengan model seluruh mata pelajarannya adalah materi agama, yang sering dikenal dengan madrasah diniyah. Jenjang pendidikannya; madrasah diniyah awwaliyyah (tingkat dasar), madrasah diniyah wustha (tingkat menengah pertama), dan madrasah diniyah 'ulya (tingkat menengah atas). Madrasah diniyah ini pada umumnya berada di masjid dan pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan dikelola oleh masyarakat [7, p. 7].

4. Pembahasan

A. Faktor Internal Problematika Pendidikan Agama di Madrasah

Manajemen pendidikan Islam yang terletak pada ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai, ketidakserasian kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional, terjadinya salah pengukuran terhadap hasil pendidikan serta masih belum jelasnya landasan yang di pergunakan untuk menetapkan jenjang-jenjang tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga keperguruan tinggi.[10, p. 79]

Sebagai acuan dalam melihat keberhasilan tujuan pendidikan agama bisa dilihat dari tiga indikasi pokok, pertama, keberhasilan mentransfer ilmu, kedua pentransferan nilai, ketiga pentransferan ketrampilan. Bagian pertama terkait dengan pengetahuan kognitif. Bagian kedua terkait dengan nilai baik dan buruk, peserta didik diarahkan mencintai nilai-nilai kebaikan dan membenci nilai-nilai kejahatan, bagian ketiga terkait dengan perbuatan nyata.[4, p. 9]

Dinamika madrasah hingga saat ini mengantarkan madrasah menjadi sekolah yang berciri khas agama Islam, setelah terlebih dahulu diakuinya bahwa madrasah setara dan sederajat dengan sekolah berdasarkan SKB Tiga Menteri pada tahun 1975. Hal itu dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1989 dan UUSPN No. 20 Tahun 2003 yang menguatkan kedudukan madrasah yaitu dengan memposisikan madrasah ke dalam jenis pendidikan umum, berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang menyatakan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang bercirikan Islam. Sebagai sub sistem pendidikan nasional, madrasah dituntut untuk melaksanakan PP No.19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dengan tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.[4, p. 5]

Pergeseran ini berakibat pada timbulnya problematika pada kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah, sebagaimana ditemukan oleh penelitian Puslitbang Agama dan Keagamaan (2010) dalam Rohman.

1) Komponen Tujuan

Reposisi madrasah dari lembaga pendidikan yang fokus pada penguasaan ilmu-ilmu agama ke arah relatif sama dengan sekolah pada umumnya, berimplikasi madrasah didorong menjadi lebih menepati lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam. Muatan kurikulumnya sama dengan sekolah, hanya saja madrasah masih menyisakan ciri khas keislamannya dengan mata pelajaran agama, yang tidak sekuat dan sedalam dahulu pada awal terbentuknya. Akibat pergeseran ini, output madrasah menjadi serba tanggung antara mata pelajaran agama dan umum, bahkan cenderung mengantarkan siswa madrasah meninggalkan orientasi penguasaan ilmu-ilmu agama ke pola pikir yang serba profan dan materialistik.[4, p. 10]

Mulyawan menyatakan penguasaan pembelajaran agama anak madrasah masih tertinggal jauh dibandingkan santri di pesantren. Sementara dalam materi pelajaran umum, anak madrasah juga masih tetap tertinggal dari sekolah umum lainnya.[11, p. 167]

2) Komponen Materi

Ditemukan materi pendidikan di madrasah dipandang belum membangun sikap kritis, masih terbatas pada masalah-masalah keagamaan, serta tidak memiliki kepedulian terhadap perkembangan ilmu-ilmu umum, baik ilmu sosial maupun ilmu alam. Struktur kurikulum madrasah overload karena memuat mata pelajaran umum (70%) ditambah dengan mata pelajaran agama (30%) sebagai ciri khas lembaga pendidikan Islam. dan kurikulum pendidikan sarat dengan materi, tidak sarat dengan nilai. Implikasinya adalah daya serap peserta didik tidak optimal dan kelihatannya peserta didik cenderung belajar tentang banyak hal, tetapi sebenarnya dangkal dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan ketrampilan yang layak.[4, p. 11] Dari segi orientasi, materi kurikulumnya kurang berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan masa depan. Dalam kenyataannya proses pendidikan Islam kurang menarik dari sisi materi dan metode penyampaian yang digunakan. Desain kurikulum pendidikan Islam sangat didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat normatif, ritual, dan eskatologis, dan materi pendidikan disampaikan dengan semangat ortodoksi keagamaan dalam pelajaran agama yang diidentikkan dengan iman, bukan ortopraksis yaitu bagaimana mewujudkan iman dalam tindakan nyata operasional.[4, p. 11]

3) Komponen Strategi

Problematika yang muncul di lapangan adalah;

- a) Kegiatan belajar mengajar di madrasah berlangsung secara monolog dengan posisi guru yang dominan, karena murid lebih banyak pasif dan tidak memiliki ruang untuk bertanya dan mengembangkan wawasan intelektual.
- b) Lebih menekankan pada aspek kognisi daripada afeksi dan psikomotor, karena kurikulum pendidikan Islam lebih menitik beratkan pada aspek korespondensi-tekstual, yang lebih menekankan hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada. Dan ini pun baru pada aspek kognitif tingkat rendah.
- c) Pendekatan kurikulum pendidikan Islam masih cenderung bersifat normatif. Dalam arti pendidikan Islam menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya sehingga peserta didik

kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.[4, p. 12]

4) Komponen Evaluasi

Kenyataan yang ditemukan di lapangan adalah penilaian hasil belajar lebih diacukan pada penilaian individual yang lebih menekankan aspek kognitif, dan menggunakan bentuk soal-soal ujian agama Islam yang lebih menunjukkan prioritas utama pada aspek kognitif juga, serta jarang pertanyaannya tersebut mempunyai bobot muatan “nilai” dan “makna” spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.[4, p. 12]

5) SDM yang kurang

a) Pemimpin Sekolah

Pemimpin sekolah yang lemah dalam komunikasi dan negosiasi. Pimpinan pendidikan Islam bukan hanya sering kurang memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi internal dengan para guru, melainkan juga lemah dalam komunikasi dengan masyarakat, orang tua, dan pengguna pendidikan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.[10, p. 79]

b) Kompetensi Guru

Mulyawan menemukan ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Guru PAI di madrasah diantaranya;

(1) Profesionalitas.

Secara istilah, profesi dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dalam menjalaninya dan mendapatkan pengakuan dalam pekerjaan itu sendiri serta memiliki kode etik yang harus dijalani. Orang yang memiliki profesi disebut profesional. Dalam realitanya, hal tersebut sulit dicapai, salah satu penyebabnya adalah minimnya peminatan terhadap profesi keguruan khususnya PAI. Para mahasiswa yang diharapkan memiliki kompetensi yang cukup justru kurang berminat mengambil jurusan pendidikan, mereka lebih memilih jurusan seperti kedokteran, politik, hukum dan lain-lain. Bahkan ironisnya untuk prodi Pendidikan Agama Islam justru diisi oleh mahasiswa yang tidak memiliki background pendidikan agama, jelas ini menyulitkan kita untuk menghasilkan out put pendidik PAI yang berkompetensi dan professional.[11, p. 181]

(2) Kemajuan Teknologi.

Peserta didik sekarang hidup dalam kemajuan teknologi sehingga dalam pembelajaran pun tidak bisa dipisahkan dengan teknologi itu sendiri, sebagai salah satu media sekaligus sumber belajar bagi peserta didik. Bagi guru PAI, materi-materi aqidah akhlak, fikih dan lain-lain sangatlah mudah diajarkan dengan bantuan teknologi. Namun realitasnya masih banyak guru PAI yang belum mampu menjadikan teknologi sebagai media pembelajaran sekaligus sebagai sumber belajar. Meskipun penggunaan teknologi bukan penunjang utama tercapainya pembelajaran akan tetapi sangat membantu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 yang dalam proses pembelajaran menekankan pada

student centre atau pembelajaran yang berpusat pada siswa bukan lagi teacher centre atau pembelajaran yang berpusat pada guru.[11, p. 183]

B. Faktor Eksternal Problematika Pendidikan Agama di Madrasah

Secara politis, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur melalui UU sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003 diakui memang memuat keberadaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Namun pencantuman Madrasah dalam UU itu sekedar "pelengkap" komponen utama pendidikan nasional. Kenapa demikian? Karena dalam tataran praktis perhatian penyelenggara Negara tampaknya lebih menaruh perhatian dan fokus pada sekolah-sekolah umum (dibawah pengawasan Kemendiknas) baik dari sisi teknis peningkatan mutu persekolahan maupun sisi anggaran yang tersedia. Padahal, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan).[10, p. 81]

Selain itu, masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan islam adalah dichotomy dalam beberapa aspek yaitu antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, antara Wahyu dengan Akal setara antara Wahyu dengan Alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama.[6, p. 78]

Ada juga problem keterbatasan anggaran. Ketersediaan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan sangat mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan tersebut. Ketentuan anggaran pendidikan tertuang dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan yang menyatakan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ayat 1). Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD ternyata masih sangat sulit untuk dilakukan pemerintah.[5, p. 46]

5. Kesimpulan

Kiprah pendidikan Islam di kalangan umat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia untuk mencetak generasi penerus bangsa tidak bisa diabaikan lagi. Perkembangannya begitu pesat mulai dari pendidikan informal hingga menjadi pendidikan formal yang sejajar dengan pendidikan umum. Kedudukannya kuat sebagai bagian dari Sisdiknas, dengan payung hukum UU Sisdiknas yang secara tegas menyiratkan kedudukan madrasah yang sama dengan sekolah umum. Kurikulum yang termuat dalam pendidikan di madrasah adalah 100% umum ditambah ilmu agama.

Namun, meski berkembang dengan begitu pesat madrasah kerap menghadapi berbagai permasalahan. Problematika di madrasah menjadi masalah klasik diantaranya secara internal, masalah kurikulum, SDM guru, dan secara eksternal kebijakan politik dan paradigma dikotomi, dan kurangnya anggarannya.

Berbagai persoalan tersebut masih belum mendapat titik temu yang dapat menjadikan penyelenggaraan pendidikan madrasah lebih baik. Meski begitu, madrasah terus berjalan dan memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Peluangnya antara lain: semakin maraknya kehidupan umat beragama, semakin kuatnya Kemenag dalam mengelola pendidikan madrasah, animo masyarakat yang semakin baik terhadap penyelenggaraan pendidikan madrasah, serta dukungan masyarakat yang semakin luas.

6. Daftar Referensi

- [1] M. M. Choiri and A. Fitriani, "Problematika pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional di era global," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 11, no. 2, pp. 303–325, 2011.
- [2] M. Drajat, "Sejarah Madrasah Di Indonesia," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, vol. 1, no. 1, January, pp. 192–206, 2018.
- [3] M. Kosim, "Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan perkembangan)," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, 2007.
- [4] M. Rohman, "Problematika Kurikulum Pendidikan Islam," *Madaniyah*, vol. 5, no. 1, pp. 1–15, 2015.
- [5] R. Awwaliyah and H. Baharun, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)," *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 19, no. 1, pp. 34–49, 2019.
- [6] M. Damopolii, "Problematika Pendidikan Islam Dan Upaya-Upaya Pemecahannya," *TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2015.
- [7] S. Supani, "Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia," *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, vol. 14, no. 3, pp. 560–579, 2009.
- [8] F. Alawiyah, "Pendidikan Madrasah di Indonesia," *Jurnal Aspirasi*, vol. 5, no. 1, pp. 51–58, 2014.
- [9] M. R. Masykur, "Sejarah Perkembangan Madrasah Di Indonesia," *Jurnal Al-Makrifat Vol*, vol. 3, no. 2, 2018.
- [10] S. S. Aslamiyah, "Problematika pendidikan islam di Indonesia," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 3, no. 1, p. 5, 2013.
- [11] M. Mulyawan, "PROBLEMATIKA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH," *Journal Al-Manar*, vol. 9, no. 1, pp. 165–186, 2020.